

**TAHUN
2019**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA

Jalan Kenari No 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta

Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 514448, 515665

Website : tataruang.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta. Komitmen dalam Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang seoptimal mungkin sesuai potensi dan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kegiatan

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang yang diharapkan bisa terwujud.

Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kota Yogyakarta

Ir. Hari Setyowacono, MT
NIP. 19640126 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan

dengan indikatornya :

Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 64,25 atau tercapai sebesar 100% dari target sebesar 64,25.

b. Sasaran 2: Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan.

dengan indikatornya :

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 95,91 atau tercapai sebesar 100,96% dari target sebesar 95,00.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam rangka mendukung program Nasional Reformasi Agraria yang diwujudkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah berinisiatif menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 359 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang berbasis Rukun Warga (RW) di seluruh Kota Yogyakarta. Selain itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memunculkan anggaran pendamping bagi masing-masing POKMAS PTSL dan anggaran tersebut melekat di masing-masing Kecamatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Kuantitas SDM yang belum memadai.
2. Kesamaan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ternyata belum begitu sejalan dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Lamanya waktu proses pembahasan dan perolehan persetujuan substansi Raperda RTRW di Kementrian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Lama waktu proses pensertifikatan tanah dalam hal pensertifikatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak bisa diprediksi.
5. Lama waktu proses kekancingan tanah dalam hal pengurusan Surat Kekancingan atas aset yang digunakan oleh Pemkot berkaitan dengan KHP Wahono Sarto Kriyo tidak bisa diprediksi.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan tanah persil masyarakat.
7. Transaksi pembelian/pengadaan tanah sebagian gagal yang disebabkan oleh berbagai faktor diluar kendali kedinasan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

A. SAMPUL DEPAN	i
B. KATA PENGANTAR	ii
C. IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
D. DAFTAR ISI	vi
E. DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Isu-isu Strategis	3
1.4. Keadaan Pegawai	5
1.5. Keadaan Sarana Prasarana	7
1.6. Keuangan	9
1.7. Sistematika LkjIP	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	11
2.1.1. Visi dan misi Kepala Daerah	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.1.5. Sistem Pelaporan dan Koordinasi	23
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	25
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019	28
2.3.1. Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.....	28
2.3.2. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	30
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	45
3.4. Akuntabilitas Anggaran	46
3.5. Inovasi	51
BAB IV PENUTUP	52
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Menurut Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja.....	6
Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang...	7
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.....	12
Tabel 2.2 Sasaran Strategis.....	13
Tabel 2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.4 Program Pengaturan dan Program Pengendalian Tata Ruang.....	15
Tabel 2.5 Program Pengelolaan Pertanahan.....	16
Tabel 2.6 Program Internal.....	17
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama tahun 2019.....	19
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 2.9 Program Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	25
Tabel 2.11 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	26
Tabel 2.12 Program / Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.....	26
Tabel 2.13 Program / Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.....	27
Tabel 2.14 Program / Kegiatan untuk mendukung Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.....	27
Tabel 2.15 Program / Kegiatan untuk mendukung Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.....	28
Tabel 2.16 Perubahan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.....	28
Tabel 2.17 Rincian anggaran belanja langsung per sasaran strategis.....	29
Tabel 2.18 Rincian anggaran program / kegiatan internal.....	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja.....	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	30
Tabel 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	31
Tabel 3.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	32
Tabel 3.5 Target dan realisasi Kinerja Indikator Sasaran.....	34
Tabel 3.6 Akuntabilitas Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	37
Tabel 3.7 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	39
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja.....	40

Tabel 3.9 Akuntabilitas Kinerja Terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	42
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	43
Tabel 3.11 Analisis Efisiensi.....	47
Tabel 3.12 Realisasi Keuangan per Triwulan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	48
Tabel 3.13. Realisasi Keuangan per Triwulan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	50
Tabel 4.1 Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis.....	52
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

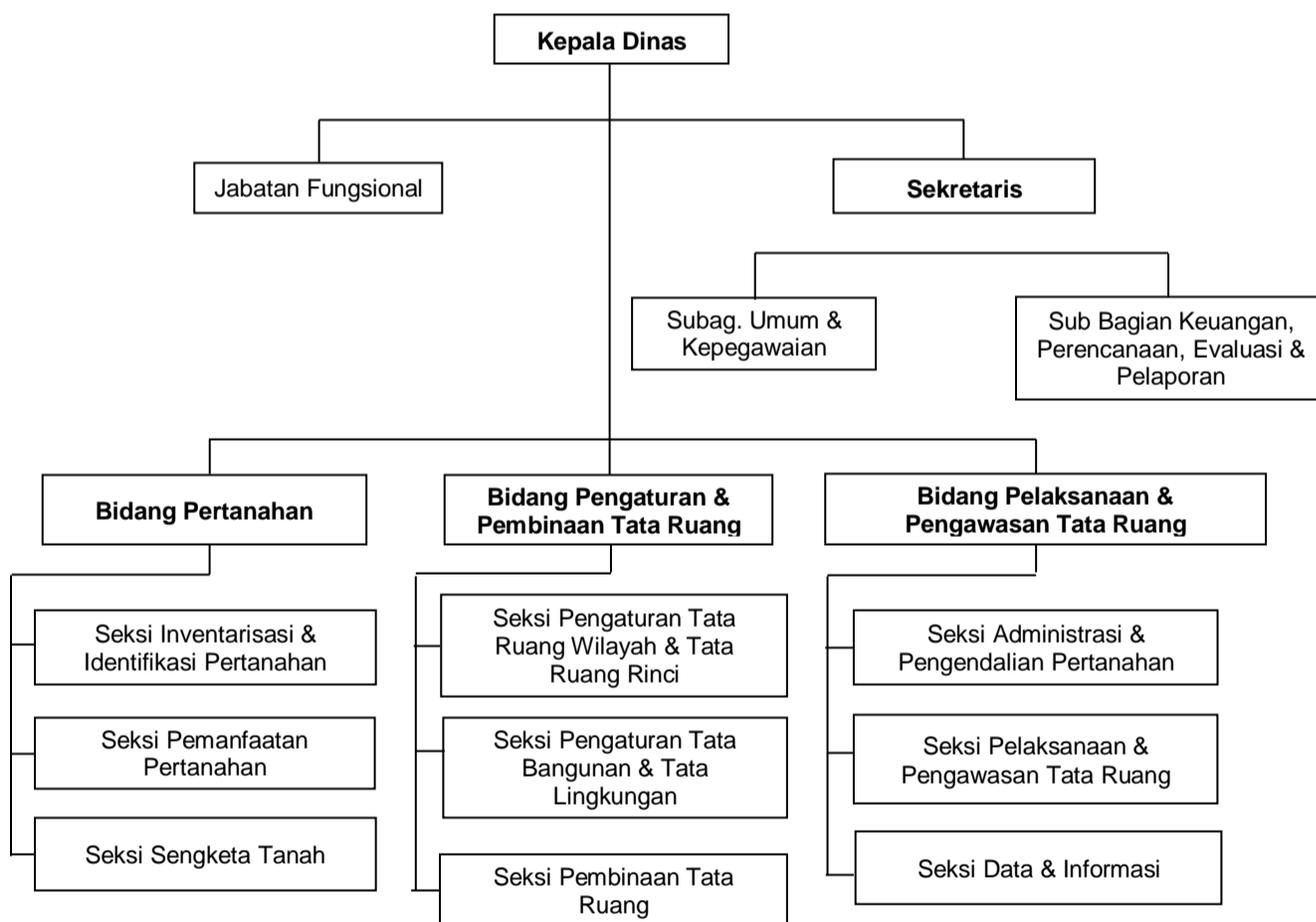
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

- c. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
 2. Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
 3. Seksi Sengketa Tanah.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengaturan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
 2. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
 3. Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
 3. Seksi Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran sebagai berikut :



1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanahan dan tata ruang;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan dan tata ruang;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanahan dan tata ruang;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang pertanahan dan tata ruang.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena belum tersedianya regulasi dan kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antarinstansi, atau ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pada instansi. Diperlukan instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang. Hal ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang yaitu perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali. Dalam skala nasional, RPJMN tahun 2015-2019 juga mencantumkan/mencantumkan perlunya peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui peran dan kerjasama beberapa instansi lintas sektor.

Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Peran lembaga khusus yang menagai pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan mampu focus kepada masalah penataan ruang. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasaran perkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal diindikasikan dari rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik enjadi ruang privat dan rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai. Tersedianya lembaga khusus untuk menangani penataan ruang diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Isu strategis yang lain terkait tata ruang adalah ruang terbuka hijau dan keterbukaan tata ruang untuk pembangunan pariwisata. Alokasi 30persen ruang terbuka hijau dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Yogyakarta dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan luasan ruang terbuka hijau yang tersedia terus meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi juga luas wilayah ber HPL/HGB terus bertambah. Keberadaan RTH bagi perencanaan pariwisata juga dapat memberikan dampak positif terkait dengan adanya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk atraksi wisata. Alokasi lahan parkir di Kota Yogyakarta bagi pariwisata maupun secara umum juga perlu dituangkan dalam tata ruang, mengingat keterbatasan area parkir saat ini yang dimiliki.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Kota Yogyakarta juga mengalami hal yang sama, dapat dilihat dari alih fungsi pemanfaatan lahan dari Taman Hiburan Rakyat (THR) dengan luas 24.690 m² yang selama ini menjadi area rekreasi warga kota, berubah pemanfaatannya menjadi ruang privat komersial yakni hotel. Ini mengakibatkan area rekreasi publik, bertemunya warga kota dari berbagai lapisan sosial semakin berkurang, sementara ruang publik yang dapat menggantikannya belum tersedia.

Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang public juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasaran perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

1.4. Keadaan Pegawai

1. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Personil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dukung oleh 35 orang karyawan yang terdiri dari : PNS 32 orang dan Tenaga Bantu (Naban) 3 orang.

Dari jumlah personil tersebut saat ini ada 1 (satu) orang yang sedang melaksanakan tugas belajar S2 (Pasca Sarjana) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Jumlah Pegawai Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

S2	: 11 orang (31,43 %)
S1	: 12 orang (34,29 %)
D III	: 2 orang (5,71 %)
SMA/K	: 7 orang (20,00 %)
Naban	: SMA: 2 orang, S1 : 1 orang

Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Jabatan dan Pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ Gol.IVc	:	1	Orang
Kepala Bidang/Sekretariat	Pembina Tingkat I / Gol. IVb	:	1	Orang
	Pembina / Gol. IVa	:	2	Orang
	Penata Tingkat I/ Gol. III d	:	1	Orang
Kepal Seksi	Pembina / Gol. IVa	:	3	Orang
	Penata Tingkat I / Gol. III d	:	3	Orang
	Penata / Gol. III c	:	3	Orang
Kepala Sub. Bag	Penata / Gol. III c	:	2	Orang
Staf	Penata Tingkat I / Gol. III d	:	1	Orang
	Penata / Gol. III c	:	3	Orang
	Penata Muda Tk.I/III b	:	6	Orang
	Penata Muda/III a	:	2	Orang
	Pengatur Tk. I/II d	:	1	Orang
	Pengatur / Gol. IIc	:	3	Orang
	Naban	:	3	Orang

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepagawaian	Jenis Kelamin	
		Laki- laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	14
2	Tenaga Bantu (Naban)	3	
	JUMLAH	21	14

2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

Tabel 1.2. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

No	Kelompok Jabatan/Sub Bag/Seksi	Jumlah Pegawai	
		Eksisting	Ideal
1	Kepala Dinas	1	1
2	Jabatan Fungsional	2	2
3	Sekretariat	8	17
4	Bidang Pertanahan	8	12
5	Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	8	12
6	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	8	11
	Total	35	55

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/ perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 1.3. Daftar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

No.	Jenis	Jumlah yang Ada	Jumlah Ideal
1.	Kendaraan roda empat	5 unit	5 unit
2.	Kendaraan roda dua	12 unit	12 unit
3.	Sepeda	2 unit	2 unit
4.	Roll meter	4 unit	4 unit
5.	Mesin ketik	6 unit	6 unit
6.	Kalkulator	6 unit	6 unit
7.	Almari	17 unit	17 unit
8.	Rak arsip besi	20 unit	20 unit
9.	Rak arsip kayu	14 unit	14 unit
10.	Filling cabinet	15 unit	15 unit
11.	Brand kas	2 unit	2 unit
12.	Cash box	1 unit	1 unit
13.	Almari lerek	12 unit	12 unit
14.	Papan board dinding	10 unit	10 unit
15.	Presensi sidik jari	1 unit	1 unit
16.	Wireless Hotspot	1 unit	1 unit
17.	Almari arsip kayu	14 unit	14 unit
18.	Kursi tamu /zice	4 unit	4 unit
19.	Meja rapat	36 unit	36 unit
20.	Meja telepon	8 unit	8 unit
21.	Meja knap	3 unit	3 unit
22.	Kursi rapat	74 unit	74 unit
23.	Kursi putar	23 unit	23 unit
24.	Kursi kerja	49 unit	49 unit
25.	Kursi lipat	124 unit	124 unit
26.	Meja komputer	6 unit	6 unit
27.	Meja kerja ½ biro	18 unit	18 unit
28.	Meja Counter	3 unit	3 unit
29.	Jam dinding	12 unit	12 unit
30.	AC	16 unit	16 unit

31.	Vacum cleaner	1 unit	1 unit
32.	Kipas Angin	11 unit	11 unit
33.	Tape Recorder	2 unit	2 unit
34.	Wireless	3 unit	3 unit
35.	UPS	24 unit	24 unit
36.	Stabiliser	1 unit	1 unit
37.	Dispenser	4 unit	4 unit
38.	Komputer	25 unit	25 unit
39.	Note book	16 unit	16 unit
40.	Printer	26 unit	26 unit
41.	Harddisk Eksternal	2 unit	2 unit
42.	Scanner	1 unit	1 unit
43.	LCD Proyektor	7 unit	7 unit
44.	Handycam	1 unit	1 unit
45.	Meja kerja biro	17 unit	17 unit
46.	Kamera digital	4 unit	4 unit
47.	Digital Voice Recorder	1 unit	1 unit
48.	LED TV 32"	8 unit	8 unit
49.	Telepon langsung	1 unit	1 unit
50.	Telepon internal	10 unit	10 unit
51.	Meja Kubical	26 unit	26 unit
52.	Almari Es	1 unit	1 unit
53.	HT	2 unit	2 unit
54.	Faximale	1 unit	1 unit
55.	Gedung	1 unit	1 unit
56.	Gudang	1 unit	1 unit
57.	Pompa Air	1 unit	1 unit
58.	Jet Cliner	1 unit	1 unit
59.	Meteran ukur	2 unit	2 unit
60.	Meteran digital	4 unit	4 unit
61.	Sketmat digital	2 unit	2 unit
62.	Kardek besi	1 unit	1 unit
63.	Papan nama instansi	1 unit	1 unit
64.	Backdrop Papan Nama Instansi	1 unit	1 unit
65.	Almari display kaca	2 unit	2 unit
66.	White board	6 unit	6 unit
67.	OHP	1 unit	1 unit
68.	Almari Kaca	7 unit	7 unit
69.	Kamera video digital	2 unit	2 unit
70.	Buku	125 buah	125 buah

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.570.278.407,- (Lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.2.182.987.562,- (Dua milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 56.387.290.845,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp.2.182.987.562,- yang didukung oleh 6 (Enam) program dan 14 (Empat belas) kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2.
		3. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah **Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat** dan **Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat** dengan indikator capaian sasaran **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** dan **Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah**.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Tertib Pertanahan dan Penataan Ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan”

Misi :

Dengan Visi seperti tersebut diatas maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang.
2. Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 6 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Misi *Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang*, bertujuan untuk **Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**.
2. Misi *Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan*, bertujuan untuk **Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan**.

Sasaran Strategis

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagaimana **Tabel 2.2.** sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019
1.	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	%	64,25
2.	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	95,00

Adapun Sasaran Strategis Jangka Menengah yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam kurun waktu enam tahun adalah sebagaimana **Tabel 2.3** sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesesuaian penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97
2	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07	92,41	95,00	96,89	98,79	100

2.1.3. Strategi Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui beberapa strategi:

- Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang.
- Optimalisasi pengelolaan pertanahan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat didukung oleh program :
 - Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
 - Pengendalian Tata Ruang

Tabel 2.4. Program Pengaturan dan Program Pengendalian Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
1	Program Pembinaan Tata Ruang			
1.1	Kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen
		Analisis Amdal Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen
1.2	Kegiatan Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)	2 Dokumen	2 Dokumen
		Draft Perwal RTBL	2 Dokumen	2 Dokumen
1.3	Kegiatan Pembinaan Tata Ruang	Laporan Telaah/Surat Informasi Keseuaian Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
		Diseminasi Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kajian Pengembangan kawasan Simpul Jaringan Transportasi/ Transit Oriented Development (TOD)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Program Pengendalian Tata Ruang			
2.1	Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
2.2	Kegiatan Pengawasan Tata Ruang	Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
		Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.	1 Dokumen	1 Dokumen
		Neraca Penatagunaan Air	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang.	1 Dokumen	1 Dokumen
2.3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA)	1 Dokumen	1 dokumen
		Pembuatan Peta Sebaran Bangunan Berbasis GIS	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pembuatan Profil Tata Ruang Kota Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen

2. Sasaran **Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat** didukung oleh program :

Pengelolaan Pertanahan sebagaimana tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program Pengelolaan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
1	Program Pengelolaan Pertanahan			
1.1	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.	Terdaftaranya Pensertifikatan aset tanah Pemkot Yogyakarta.	20 bidang	20 bidang
		Terdaftaranya Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang Tanah untuk Fasum.	5 bidang	7 bidang
		Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.	10 bidang	10 bidang
		Pelacakan dan Identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yogyakarta.	1 Dokumen	1 Dokumen
1.2	Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan Tanah Kantor	-	3 lokasi
		Pengadaan tanah untuk RTHP	2 lokasi	6 lokasi
		Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum	-	-
		Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.	1 Dokumen	1 Dokumen
1.3	Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan	1 dokumen	1 dokumen
		Pencegahan timbulnya masalah pertanahan.	1 dokumen	1 dokumen

Untuk mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan, akan didukung program internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagaimana adalah tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Program Internal

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Makan Minum Koordinasi	132 kali	146 kali
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 laporan	12 laporan
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meterai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah
		Meterai 6000 yang tersedia	400 buah	400 buah
		STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang terbayar	17 unit	17 unit
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan
		Alat Tulis Kantor	60 jenis	60 jenis
		Bahan Komputer/Printer	5 jenis	5 jenis
		Jasa Telepon	12 bulan	12 bulan
		Surat Kabar	2 jenis	2 jenis
		Buku Giro	3 buah	3 buah
		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	12 jenis
		KIR Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit	1 unit
		Jasa Percetakan	1 jenis	1 jenis
		Jasa Penggandaan	76.832 lbr	76.832 lbr
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia.	4 jenis	4 jenis
		Bahan Bacaan/peraturan Perundangan.	6 buah	6 buah
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	30 Dokumen ASN	30 Dokumen ASN
Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang		
Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan kantor/tempat	1 jenis	1 jenis
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 unit	17 unit
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA).	5 dokumen	5 dokumen
		Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil).	5 dokumen	5 dokumen
		Dokumen administrasi penata-usahaan Keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 jenis	4 jenis

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan, menengah dan tinggi yang merata serta berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tingkat keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang secara rinci tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai tentu memerlukan pengukuran yang realistis agar dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut.

Memperhatikan berbagai aspek tersebut diperlukan Indikator Kinerja Utama Dinas. Indikator kinerja utama adalah penjabaran dari indikator sasaran strategis. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat dengan indikator Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Target 64,25% dijabarkan menjadi Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Target 72,00%, Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang Target 56,50%.

Adapun Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat dengan indikator Tertib Administrasi Pertanahan Target 95,00% dijabarkan menjadi Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot Target 66% x 94,82% dan indikator Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan Target 34% x 95,34%.

Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2019 sebagaimana tabel 2.7 sebagai berikut:

No.	Sasaran Renstra	Uraian Indikator	Target 2019	Bidang / Seksi Pengampu
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	72,00%	Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang,
		Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang	56,50%	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.	94,82%	Bidang Pertanahan
		Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan	95,34%	Bidang Pertanahan

Adapun Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel 2.8. sebagai berikut:

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra	Uraian Indikator	Target Kinerja						Sumber Data	Bidang / Seksi Pengampu
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	52,30%	61,40%	72%	79,40%	86,50%	88,48%		Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang,
		Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang	43,50%	50,25%	56,50%	61,75%	68,00%	75,45%		Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.	29,40%	91,80%	94,82%	96,89%	98,96%	100,00%		Bidang Pertanahan
		Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan	31,38%	93,60%	95,34%	96,89%	98,45%	100,00%		Bidang Pertanahan

Program untuk mencapai Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana tabel 2.9 adalah sebagai berikut:

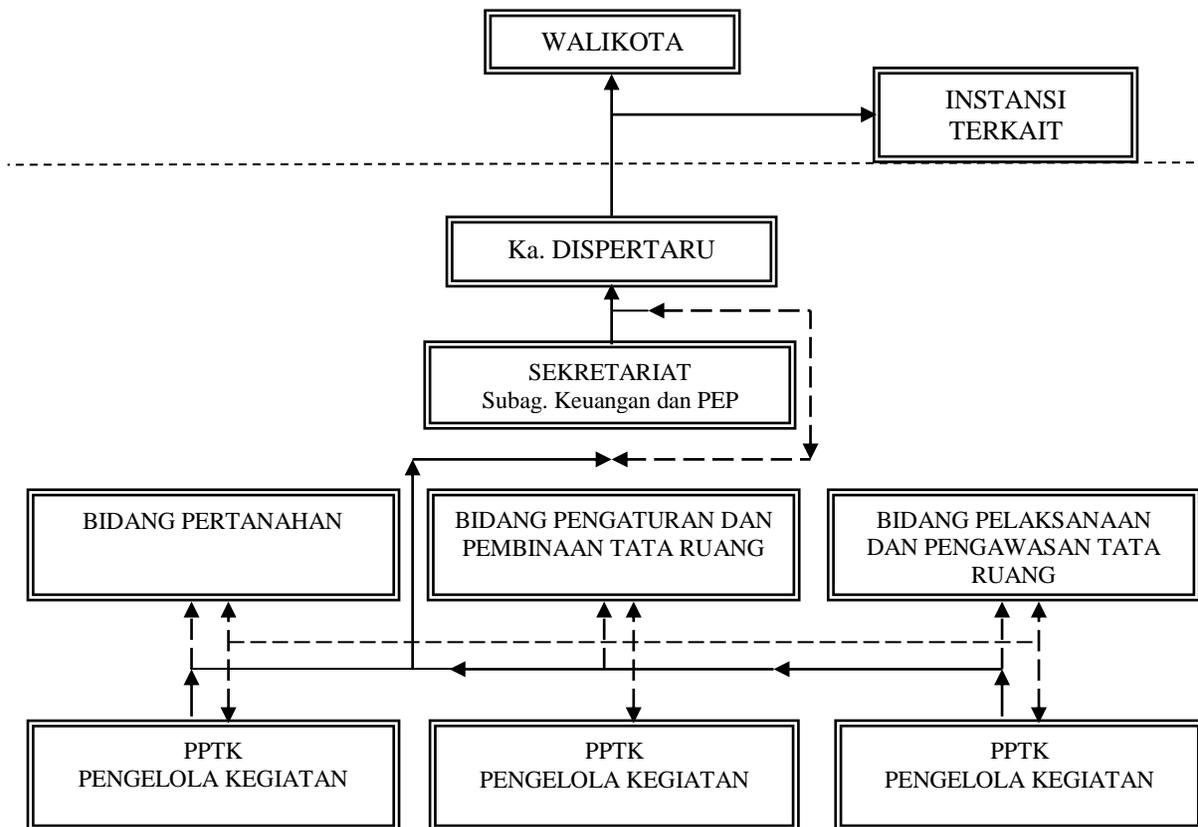
Tabel 2.9. Program Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25%
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	72,00%
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan Tata Ruang 1. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci <ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW - Analisis Amdal Kawasan 2. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) - Draft Perwal RTBL 	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Tata Ruang 1. Pembinaan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Laporan telaah penataan ruang - Diseminasi Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta. - Kajian Pengembangan Kawasan Simpul Jaringan Transportasi/ Transit Oriented Development (TOD) - Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yk. - Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yogyakarta. 	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang	56,50%
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Tata Ruang 1. Pengendalian Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan - Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 	1 dokumen 1 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Tata Ruang 1. Pengawasan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas) - Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang - Laporan Penerapan Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang. - Neraca Penatagunaan Air - Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang 	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Tata Ruang 1. Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) - Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA) - Pembuatan Peta Sebaran Bangunan Berbasis GIS. - Pembuatan Profil Tata Ruang Kota Yogyakarta. 	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	95,00%
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.	94,82%
	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Pertanahan 1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar nya Pensertifikatan aset tanah milik Pemkot Yogyakarta 20 bidang - Terdaftar nya permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang Tanah untuk Fasum. 9 bidang - Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 10 bidang - Pelacakan dan Identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. 1 dokumen 2. Penyelesaian Masalah Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian masalah pertanahan 1 dokumen - Pencegahan timbulnya masalah pertanahan 1 dokumen 	
	Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan	95,34%
	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Pertanahan (Pengadaan Tanah) 1. Pemanfaatan Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah Kantor 3 lokasi - Pengadaan tanah untuk RTHP 6 lokasi - Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum - - Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara 1 dokumen 	

2.1.5. Sistem Pelaporan dan Koordinasi

2.1.5.1. Bagan Sistem Pelaporan, Evaluasi, dan Konsolidasi



Keterangan:

- > Garis pelaporan
- - -> Garis evaluasi dan konsolidasi

2.1.5.2. Mekanisme Pelaporan

2.1.5.2.1. Alur Laporan

- Dimulai dari pelaporan kegiatan dalam hal ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Laporan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PPTK yang dibantu oleh Pendukung Administrasi Umum kegiatan dan Pendukung Administrasi Keuangan, dikonsolidasikan dengan Bidang sesuai tugas pokok dan fungsi melalui seksi dan subag, perkembangan kegiatan disampaikan melalui aplikasi SIM pelaporan.
- Sekretariat dalam hal ini Sub. Bag. Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan merekap dan menganalisa, melaporkan sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan.

- Seluruh materi laporan di entrykan di SIM Dalbang oleh Petugas Urusan Pendukung Administrasi Umum

2.1.5.2.2.Tatakala/ Waktu Pelaporan.

Awal sampai dengan akhir hari dalam bulan yang bersangkutan merupakan waktu pelaksanaan kegiatan. Maksimal tanggal 5 bulan berikutnya laporan tiap bulan dan tribulan harus sudah terkirim menggunakan aplikasi SIM Pelaporan Bagian Pengendalian Pembangunan.

2.1.5.2.3.Metode Pengumpulan Data

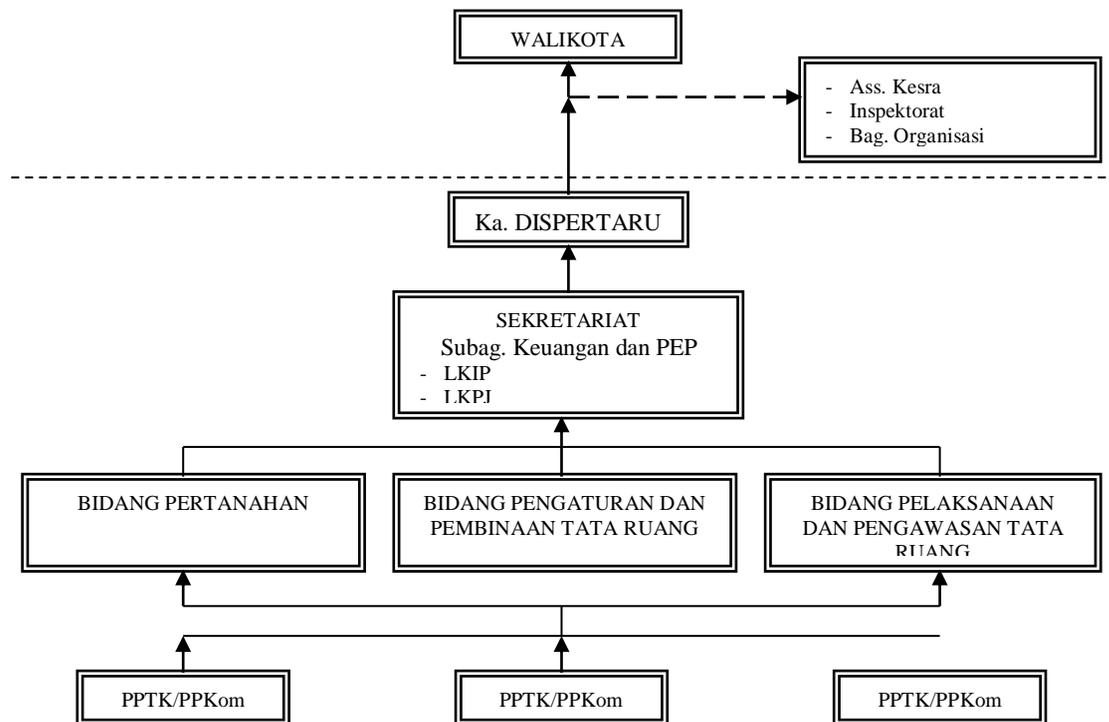
Pengumpulan data dari para petugas urusan Administrasi Umum pada masing-masing kegiatan.

2.1.5.2.4.Evaluasi dan Konsolidasi

- Evaluasi dan konsolidasi dilaksanakan baik lintas PPTK, lintas seksi/Sub Bagian dan lintas bidang secara vertical (baik *top down* maupun *bottom up*) dan secara horizontal maupun diagonal tergantung aspek/materi pembahasan.
- Waktu pelaksanaan evaluasi dan konsolidasi dilakukan dengan rentang waktu bulanan serta insidental tergantung urgensi kasus, bahasan, atau materi.

2.1.5.3.Sistem Pedoman Pengumpulan Data Kinerja

3.1. Bagan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja



Keterangan:

→ Alur Pengumpulan data

1. Prosedur pengumpulan data kinerja
 - a. PPTK membuat dan melaporkan progres kegiatan kepada Kepala DISPERTARU dengan persetujuan Kepala Bidang, Sekretariat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.
 - b. Laporan dihimpun secara elektronik dalam bentuk SIM Dalbang oleh masing-masing PPTK untuk data kinerja dan dihimpun secara elektronik dalam bentuk SIPKD untuk data kinerja keuangan
 - c. Sekretariat (Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) merekap, memproses, mengolah laporan-laporan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja.
 - d. Draft penyusunan Laporan Kinerja dibahas dalam rapat koordinasi lintas Bidang dan Sekretariat.
 - e. Laporan Kinerja Dinas disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Inspektorat.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.10. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang meningkat.	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.	64,25
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks tertib administrasi pertanahan	94,95

Pada tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya penambahan target pada salah satu sasaran strategis Dinas. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang meningkat.	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.	64,25
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks tertib administrasi pertanahan	95,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Rp. 1.963.661.360,-	Perubahan APBD
2. Program Pengendalian Tata Ruang	Rp. 1.070.771.240,-	Perubahan APBD
3. Program Pengelolaan Pertanahan	Rp. 52.237.394.185,-	Perubahan APBD

Untuk indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, akan dicapai dengan program/kegiatan :

Tabel 2.12. Program/Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
I	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	
1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	- Tersedianya Draft Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	- Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.
3	Pembinaan Tata Ruang	- Meningkatnya sinergitas dan keselarasan Pembangunan Kota Yogyakarta dengan tata ruang kota maupun tata ruang keistimewaan.

Untuk indikator Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang, akan dicapai dengan program/kegiatan :

Tabel 2.13. Program/Kegiatan untuk mendukung Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
I	Program Pengendalian Tata Ruang	
1	Pengendalian Tata Ruang	- Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah.
2	Pengawasan Tata Ruang	- Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.
3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	- Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi tata ruang dan pertanahan Kota Yogyakarta

Untuk indikator Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot, akan dicapai dengan program/kegiatan :

Tabel 2.14. Program/Kegiatan untuk mendukung Tertib administrasi pertanahan Meningkat.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
I	Program Pengelolaan Pertanahan	
1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	- Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. - Persentase pengurusan peta bidang tanah untuk Fasum jalan kampung di wilayah Kota Yk. - Pengurusan Surat Kekancingan yang digunakan oleh Pemkot Yogyakarta - Teridentifikasi dan terverifikasi tanah negara/pemkot yang berada di sepanjang sungai.
2	Penyelesaian Masalah Pertanahan	- Kejelasan status pertanahan

Sedangkan untuk mencapai Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan dilaksanakan program/kegiatan :

Tabel 2.15. Program/Kegiatan untuk mendukung Tertib administrasi pertanahan meningkat.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomes (Hasil)
I	Program Pengelolaan Pertanahan	
1	Pemanfaatan Pertanahan	- Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta - Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 8.705.631.859,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 2.279.709.174,- dan Belanja Langsung Rp.6.425.922.685,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp.58.570.278.407,-. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.2.182.987.562,- dan Belanja Langsung Rp.56.387.290.845,-.

2.3.1. Target Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Perubahan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebesar Rp 58.570.278.407,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16. Perubahan Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.182.987.562,-	3,72
2	Belanja Langsung	56.387.290.845,-	96,28
Jumlah		58.570.278.407,-	100,00

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17. Rincian anggaran belanja langsung per sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
I	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat		
A	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	1.963.661.360	
1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	1.027.483.620	APBD
2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	668.011.120	APBD
3	Pembinaan Tata Ruang	268.166.620	APBD
B	Program Pengendalian Tata Ruang	1.070.771.240	
1	Pengendalian Tata Ruang	224.080.000	APBD
2	Pengawasan Tata Ruang	351.922.620	APBD
3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	494.768.620	APBD
II	Tertib administrasi pertanahan meningkat.		
A	Program Pengelolaan Pertanahan	52.237.394.185	
1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	143.561.205	APBD
2	Pemanfaatan Pertanahan	51.977.675.300	APBD
3	Penyelesaian Masalah Pertanahan	116.157.680	APBD

Adapun anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program internal dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18. Rincian anggaran program/kegiatan internal :

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	663.869.640	
1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	146.150.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	517.719.640	APBD
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	387.897.000	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	274.132.000	APBD
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113.765.000	APBD
C	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.697.420	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	63.697.420	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25	64,25	100 %
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	95,00	95,72	100,76 %

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada tahun 2019, semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (tercapai $\geq 100\%$) dari total indikator.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran 1: Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

Tabel. 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formula Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	(50%Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50%Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program/kegiatan :

Tabel 3.4. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25%	64,25%	100%
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	72,00%	72,00%	100%
	- Pengaturan Tata Ruang 1. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci - Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW - Analisis Amdal Kawasan	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%
	2. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) - Draft Perwal RTBL	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	100%
	- Pembinaan Tata Ruang 1. Pembinaan Tata Ruang - Laporan telaah penataan ruang - Diseminasi Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta. - Kajian Pengembangan Kawasan Simpul Jaringan Transportasi/Transit Oriented Development (TOD). - Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yogyakarta. - Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yogyakarta.	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang	56,50	56,50%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan - Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) - Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang. - Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang. - Neraca Penatagunaan Air - Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang. 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) - Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA) - Pembuatan Peta Sebaran Bangunan berbasis GIS. - Pembuatan Profil Tata Ruang Kota Yogyakarta 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	100%

- Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

$$K1 = \frac{\sum \text{persentase realisasi target kinerja}}{3} \times \text{target kinerja}$$

$$K1 = \frac{(100\%+100\%+100\%)}{3} \times 72,00 \% = 72,00\%$$

- Program Pengendalian Tata Ruang

$$K2 = \frac{\sum \text{persentase realisasi target kinerja}}{3} \times \text{target kinerja}$$

$$K2 = \frac{(100\%+100\%+100\%)}{3} \times 56,50 \% = 56,50 \%$$

Capaian indikator sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat

$$K = \frac{K1 + K2}{2}$$

$$K = \frac{72,00 + 56,50}{2} = 64,25 \%$$

Tabel 3.5. Target dan realisasi kinerja indikator sasaran

No	Indikator	Capaian 2017	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90	64,25%	64,25%	100%	81,97	78,38%

3.1.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019;

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja APBD level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

- b. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:
- a. Pengukuran kinerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran kinerja.
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan APBD data hasil Pengukuran kinerja dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 64,25% dan terealisasi sebesar 64,25%. Dengan demikian, pencapaian target kinerja dapat terpenuhi 100%.

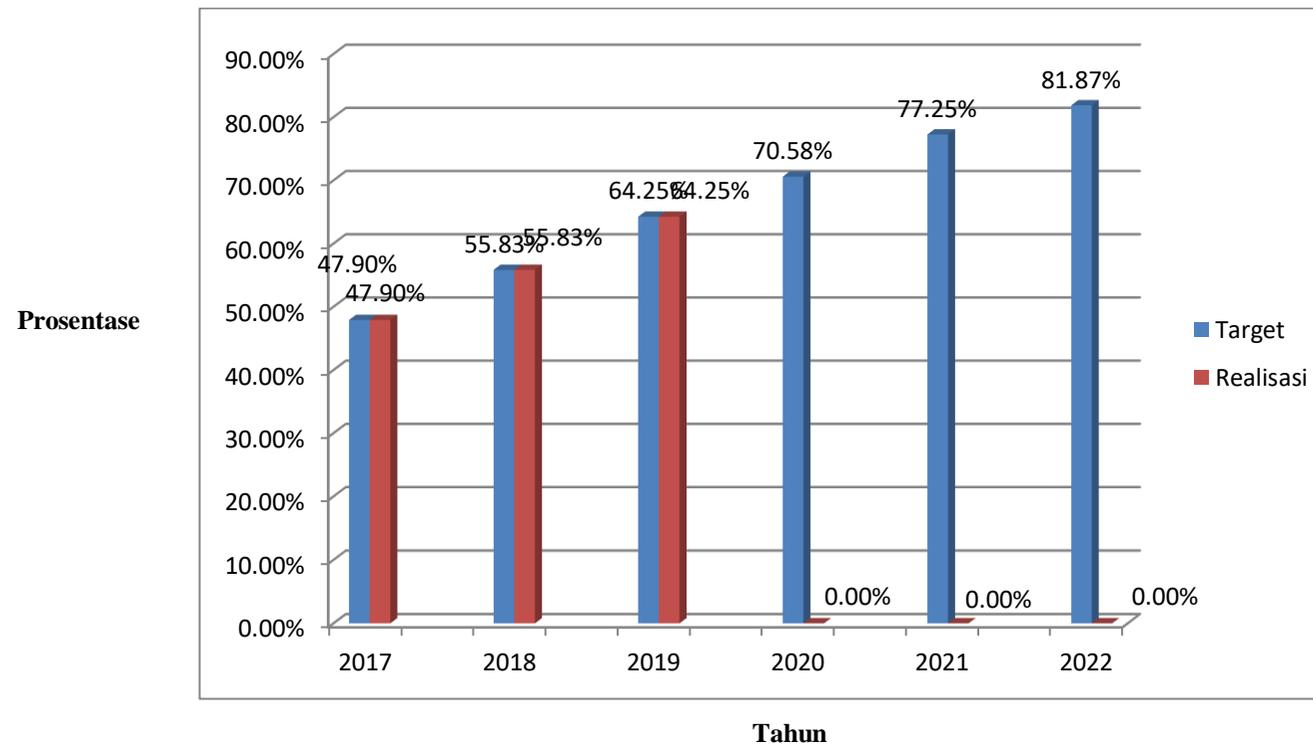
3.1.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga masa Renstra 2017 – 2022 dimana kinerjanya dapat mencapai 100%.

Tabel 3.6. Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90%	47,90%	55,83%	55,83%	64,25%	64,25%	70,58%	0,00%	77,25%	0,00%	81,87%	0,00%

Grafik 1. Target dan realisasi sasaran terlaksananya kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat



3.1.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 64,25%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 78,38%.

3.1.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

3.1.1.5. Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut ;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

3.1.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat yaitu:

1. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang yang meliputi kegiatan:
 - Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
 - Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
 - Pembinaan Tata Ruang

Indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dapat tercapai 100%

2. Program Pengendalian Tata Ruang yang meliputi kegiatan:
 - Pengendalian Tata Ruang
 - Pengawasan Tata Ruang
 - Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang

Indikator Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang dapat tercapai 100%

3.2.2. Sasaran 2: Tertib administrasi pertanahan meningkat.

Tabel. 3.7. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formula Indikator
Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program/kegiatan :

Tabel 3.8. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	95,00%	95,91%	100,96%
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.	94,82 %	96,11 %	101,47%
	- Administrasi Pertanahan			
	1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan			175%
	- Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	20 bidang	35 bidang	
	- Pengurusan Peta Bidang Tanah	9 bidang	7 bidang	
	- Pengurusan untuk Surat kekancingan	10 bidang	10 bidang	
	- Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah Pemkot	1 dokumen	1 dokumen	
	2. Penyelesaian Masalah Pertanahan			100%
	- Penyelesaian masalah pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	
	- Pencegahan timbulnya masalah pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	
	Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan	95,34%	95,53%	100,19%
	- Administrasi Pertanahan (Pengadaan Tanah)			
	1. Pemanfaatan Pertanahan			100%
	- Pengadaan tanah pembangunan kantor kelurahan	3 lokasi	3 lokasi	
	- Pengadaan tanah untuk RTHP	6 lokasi	6 lokasi	
	- Pengadaan tanah untuk Balai Serbaguna	-	-	
	- Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara	1 dokumen	1 dokumen	

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program Pengelolaan Pertanahan yang meliputi dua indikator kinerja program yaitu:

1. Indikator **Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot**, didukung oleh dua kegiatan:

- Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan
- Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Penghitungan capaian kinerja Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot Tahun 2019 diukur atas dasar diperolehnya :

- Bukti Pembayaran (BP) pendaftaran pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Sebagai output target Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.

Jika dokumen diatas terpenuhi maka capaian kinerja 100%.

2. Indikator **Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan**, didukung oleh kegiatan Pemanfaatan Pertanahan.

Penghitungan capaian kinerja Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan Mengacu kepada terpenuhinya tahapan proses pengadaan tanah yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, proses appraisal sampai dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan atau pembayaran.

kinerja diperhitungkan tercapai 100% apabila telah sampai proses pelaksanaan musyawarah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam :

1. SK Tim Pelaksana Kegiatan
2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
3. Dokumen Appraisal
4. Berita Acara Proses Musyawarah.

Perhitungan capaian sasaran kinerja Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$K = \frac{(\text{persentase realisasi pensertifikatan tanah aset pemkot} \times 66\%)^1 + (\text{persentase realisasi tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah} \times 34\%)^2}{2}$$

$$K = \frac{(96,11\% \times 66\%) + (95,53\% \times 34\%)}{2} = 95,91\%$$

- 1) Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot diperoleh dari persentase capaian realisasi terhadap target pada output Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan sesuai dengan metadata penyusunan Renstra OPD 2017-2022.
- 2) Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan diperoleh dari persentase realisasi proses administrasi pengadaan tanah yang meliputi persiapan, perencanaan, appraisal, dan musyawarah pada kegiatan Pemanfaatan Pertanahan sesuai dengan metadata penyusunan Renstra OPD 2017-2022.

Tabel 3.9. Target dan realisasi Kinerja

No	Indikator	Capaian 2017	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07	95,00%	95,91%	100,96%	100	95,91%

3.2.2.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019;

Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 95,00%, dan terealisasi sebesar 95,72%
 Dengan demikian, pencapaian target kinerja dapat terpenuhi 100,96%.

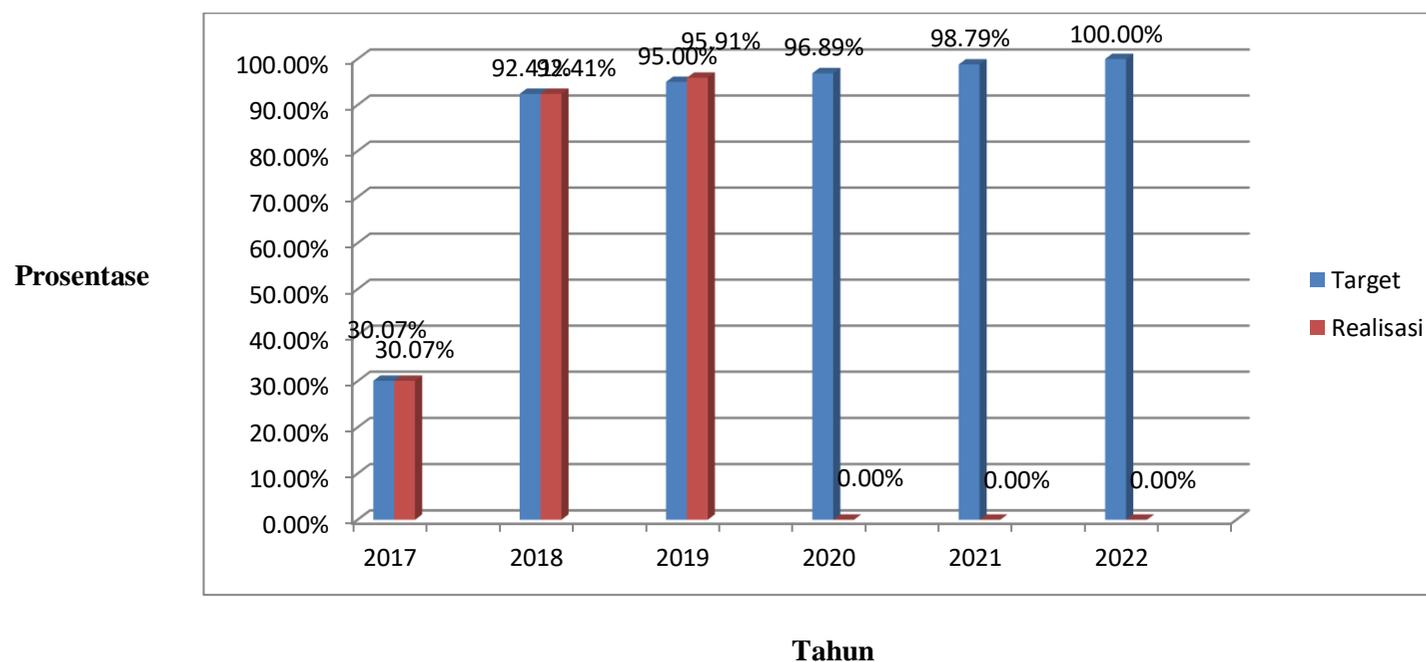
3.2.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga masa Renstra 2017 – 2022 dimana kinerjanya dapat mencapai 100,76%.

Tabel 3.10. Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07%	30,07%	92,41%	92,41%	95,00%	95,91%	96,89%	0,00%	98,79%	0,00%	100%	0,00%

Grafik 2. Target dan realisasi sasaran terlaksananya Tertib administrasi pertanahan meningkat.



3.2.2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 95,00%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 100,96% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 95,91%.

3.2.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompetain, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

3.2.2.5. Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut ;

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai yang terbatas dan terdapat kekosongan pegawai pada beberapa jabatan teknis. Namun seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

3.2.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Program Pengelolaan Pertanahan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat meliputi kegiatan:

1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
2. Penyelesaian Masalah Pertanahan

Mendukung pencapaian indikator Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot 100%. Yang dihitung dari output Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap target pada Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.

3. Pemanfaatan Pertanahan

Mendukung pencapaian indikator Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan 100%.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Lainnya

Dalam rangka mendukung program Nasional Reformasi Agraria yang diwujudkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah berinisiatif menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 359 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat PTSL Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang berbasis Rukun Warga (RW) di seluruh Kota Yogyakarta. Selain itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah berkoordinasi dengan TAPD untuk memunculkan anggaran pendamping bagi masing-masing POKMAS PTSL dan anggaran tersebut melekat di masing-masing Kecamatan.

Target Nasional (BPN) : 2.500 untuk tanah yang terdata di Kota Yogyakarta untuk PTSL Tahun 2019.

Realisasi : 1.259 tanah.

Hal ini disebabkan kerana untuk sebagian besar tanah di Kota Yogyakarta sudah masuk pendataan dalam PTSL tahun sebelumnya.

3.2.3. Capaian Kinerja Internal

Untuk Pengukuran kinerja internal teralokasikan dalam 3 program kegiatan internal yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan di Sekretariat dengan anggaran belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 663.869.640,00, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dengan anggaran Rp 387.897.000,00. dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp 63.697.420,00. Program-program tersebut semua dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan kebutuhan dengan realisasi fisik mencapai 100 %.

3.4. Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 52,48 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 72,94%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,86%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat (96,73%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat (49,14%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.11. Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25%	64,25%	100,00%	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	963.661.360,00	1.840.347.264,00	93,72
						Pengendalian Tata Ruang	1.070.771.240,00	1.068.023.150,00	99,74
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	95,00%	95,91%	100,96%	Pengelolaan Pertanahan	52.237.394.185,00	25.668.025.817,00	49,14

Tabel 3.12 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	100	96,73	3,26%
2.	Tertib administrasi Pertanahan Meningkatkan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100,76	49,14	51,62%

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

Analisis Efisiensi

Penyerapan anggaran yang belum optimal pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat disebabkan :

- a. Adanya proses musyawarah harga yang mendasarkan pada harga hasil appraisal sehingga terjadi efisiensi anggaran.
- b. Tidak tercapainya mufakat terkait harga tanah dengan pemilik tanah pada pekerjaan :
 - Pengadaan tanah untuk Kantor Kelurahan Gunugketur
 - Pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Giwangan
 - Pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Gedongkiwo

Namun demikian keseluruhan proses/mechanisme pengadaan tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku telah dilaksanakan sehingga sasaran kinerja strategis tetap tercapai 100%.

Pada sasaran kinerja Penyelenggaraan penataan ruang meningkat yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Tata Ruang, seluruh kegiatan dan pekerjaan pada kedua program tersebut dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan memanfaatkan anggaran sebesar 96,73 % karena adanya efisiensi anggaran.

Pada sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat yang didukung oleh program Pengelolaan Pertanahan, realisasi anggaran mencapai 49,14%. Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan tidak tercapainya kesepakatan harga tanah dengan pemilik tanah pada pekerjaan pengadaan tanah untuk Kantor Kelurahan Gunungketur, Pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Giwangan dan Pengadaan untuk RTHP Kelurahan Gedongkiwo. Pemilik tanah meminta harga yang lebih tinggi dari harga tanah hasil *appraisal* sehingga sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku proses pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan.

Pada Program-program yang mengampu sasaran kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat, deviasi terjadi terutama disebabkan oleh proses administrasi pencairan termijn yang cukup lama sehingga berimbas pada penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sedangkan pada program yang mengampu sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat, deviasi yang besar terjadi ketika terjadi kegagalan pengadaan tanah dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga tanah dengan pemilik tanah.

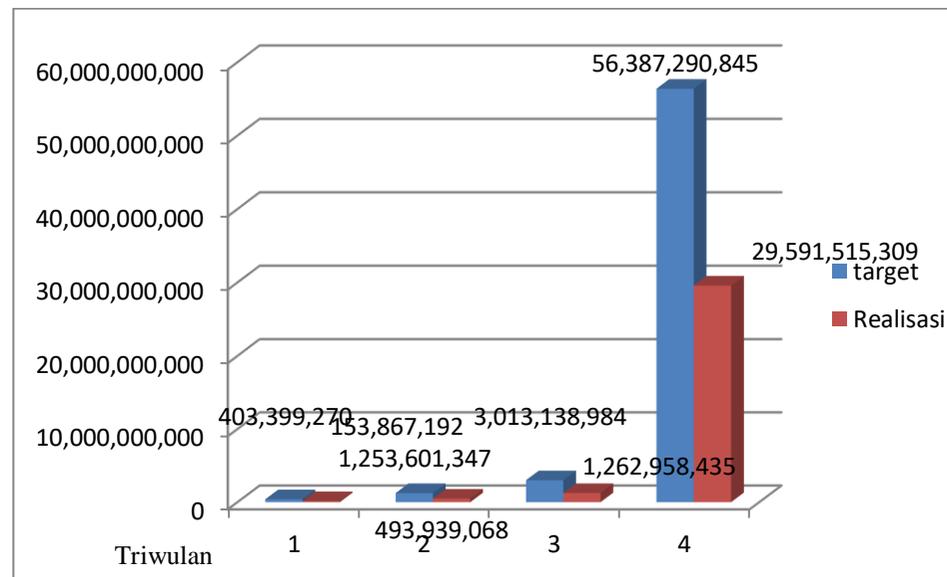
Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ke depan perlu ditingkatkan lagi agar realisasi keuangan bisa disesuaikan dengan plotting target anggaran pada tiap tribulannya. Perencanaan pencapaian target/output kegiatan/pekerjaan dan perencanaan plotting anggarannya yang sesuai dapat mengurangi potensi deviasi yang cukup besar. Namun demikian, untuk pekerjaan pengadaan tanah, potensi deviasi yang besar kemungkinannya akan selalu ada mengingat harga tanah hasil *appraisal* dan permintaan harga tanah dari pemilik tanah bisa sangat berbeda.

Tabel 3.13. Realisasi Keuangan per Triwulan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.731.130	68.989.466	72,07	286.272.447	156.847.429	54,79	506.033.944	278.976.286	55,13	663.869.640	588.657.172	88,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	51.495.000	27.168.526	52,76	89.406.000	48.649.176	54,41	286.897.000	74.185.126	25,86	387.897.000	365.525.026	94,23
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.444.540	6.630.200	57,93	28.513.000	23.426.460	82,16	43.686.760	38.738.720	88,67	63.697.420	60.936.880	95,67
4	Program Pembinaan Tata Ruang	80.929.020	15.587.100	19,26	461.232.825	130.092.100	28,21	1.109.377.280	640.998.797	57,78	1.963.661.360	1.840.347.264	93,72
5	Program Pengendalian Tata Ruang	23.413.680	15.325.300	65,45	174.406.200	44.679.270	25,62	808.633.720	80.667.040	9,98	1.070.771.240	1.068.023.150	99,74
6	Program Pengelolaan Pertanahan	140.385.900	20.166.600	14,37	213.770.875	90.244.633	42,22	258.510.280	149.392.466	57,79	52.237.394.185	25.668.025.817	49,14
	Jumlah	403.399.270	153.867.192	38,14	1.253.601.347	493.939.068	39,40	3.013.138.984	1.262.958.435	41,92	56.387.290.845	29.591.515.309	52,48

Gambar 3. Grafik Realisasi Keuangan Per Triwulan

Anggaran



3.5. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2019 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU)

Pembuatan sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui handphone berbasis android dan komputer sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi.

2. Penyempurnaan Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA)

Pembuatan sistem aplikasi mengenai informasi tanah kasultanan dan kadipaten untuk mengetahui sebaran tanah-tanah kasultanan dan kadipaten baik yang sudah memiliki alas hak maupun belum.

3. Pembuatan aplikasi Bank Tanah

Pembuatan sistem aplikasi basis data pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memuat data usulan pengadaan dan hasil pengadaan tanah sehingga memudahkan dalam merencanakan dan rekapitulasi hasil pengadaan tanah secara cepat dan efektif.

4. Fasilitasi Perubahan Peta Bidang Persil Tanah Masyarakat untuk Fasilitas Umum.

Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk perubahan peta bidang persil yang masih menyatu dengan fasum berupa pembebasan biaya dan semua proses pengurusan perubahan peta bidang ditangani oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2019 adalah sangat baik dengan capaian kinerja sasaran mencapai 100%.

Tabel 4.1. Realisasi pencapaian sasaran strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	64,25%	64,25%	100%
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	95,00%	95,72%	100,76%

Sedangkan untuk dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 58.570.278.407,00. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 31.718.756.501,00 (54,16%). Tidak optimalnya penyerapan anggaran merupakan imbas dari tidak dapat tercapainya kesepakatan harga tanah dengan pemilik tanah. Rincian realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Realisasi Anggaran

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp	%
A	Belanja Daerah	58.570.278.407 ,00	31.718.756.501,00	54,16
B	Belanja Tidak Langsung	2.182.987.562,00	2.127.241.192,00	97,45
C	Belanja Langsung	56.387.290.845,00	29.591.515.309,00	52,48
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	663.869.640,00	588.657.172,00	88,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	387.897.000,00	365.525.026,00	94,23
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.693.420,00	60.936.880,00	95,67
4	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	1.963.661.360,00	1.840.347.264,00	93,72
5	Program Pengendalian Tata Ruang	1.070.771.240,00	1.068.023.150,00	99,74
6	Program Pengelolaan Pertanahan	52.237.394.185,00	25.668.025.817,00	49,14

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Keberhasilan :

Capaian sasaran strategis dapat tercapai 100% didukung oleh:

1. Terciptanya etos kerja dan komitmen dari pegawai
2. Adanya koordinasi internal dinas yang cukup sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

B. Hambatan:

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemui beberapa hambatan antara lain:

1. Kuantitas SDM yang belum memadai.
2. Kesamaan pemahaman terhadap aturan-aturan yang ternyata belum begitu sejalan dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Lamanya waktu proses pembahasan dan perolehan persetujuan substansi Raperda RTRW di Kementrian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Lama waktu proses pensertifikatan tanah dalam hal pensertifikatan aset Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak bisa diprediksi.
5. Lama waktu proses kekancingan tanah dalam hal pengurusan Surat Kekancingan atas aset yang digunakan oleh Pemkot berkaitan dengan KHP Wahono Sarto Kriyo tidak bisa diprediksi.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan tanah persil masyarakat.
7. Transaksi pembelian/pengadaan tanah sebagian gagal yang disebabkan oleh berbagai faktor diluar kendali kedinasan.

C. Antisipasi:

1. Penambahan kuantitas SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Pengayaan informasi dan peningkatan terhadap pemahaman aturan-aturan yang digunakan dari seluruh Perangkat Daerah terkait.
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar segera dilakukan pembahasan Raperda RTRW.
5. Mengintensifkan koordinasi untuk percepatan proses kekancingan.
6. Mengintensifkan diseminasi ke masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses perubahan peta bidang untuk fasilitas umum yang menyatu dengan persil tanah masyarakat.
7. Melakukan proses percepatan pengadaan tanah untuk meminimalisir kegagalan pengadaan tanah.
8. Memaksimalkan harga negosiasi sesuai harga maksimal appraisal.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Tahun Anggaran 2019. Untuk tahun-tahun mendatang kiranya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) selalu mohon dukungan semua pihak dalam mewujudkan Visi, Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2020
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

Ir. Hari Setyowacono, MT.
NIP. 19640126 199303 1 005

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

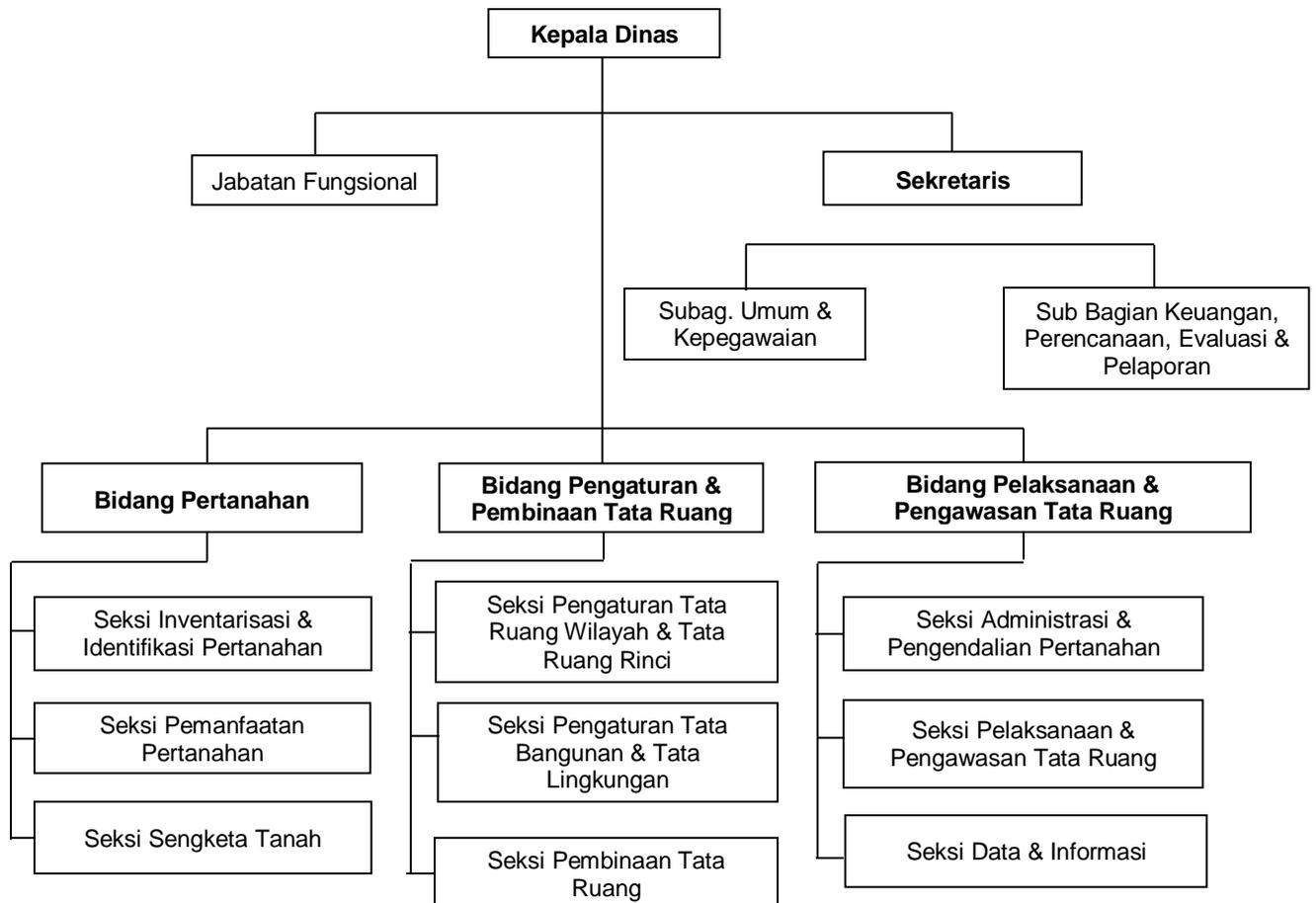
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Lampiran 7. Pengukuran Kinerja

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KOTA YOGYAKARTA





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 555241; EMAIL : pertanahantataruang@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**PERENCANAAN STRATEGIS
TAHUN 2017 – 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kesesuaian penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47,90	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97
2	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30,07	92,41	95,00	96,89	98,79	100



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 555241; EMAIL : pertanahantataruang@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Membuat Laporan Kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dengan menambahkan perbandingan dengan standar nasional/RPJMN.	Mendukung program nasional reformasi agraria berupa fasilitasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dengan menyediakan dana pendukung dari APBD dan Pembentukan Kelompok Masyarakat PTSL berbasis RW se Kota Yogyakarta.
2.	Menata dan melakukan pendokumentasian data/bukti dengan baik terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran, program, kegiatan maupun rencana aksi yang dilaksanakan.	Melaksanakan penataan dan pendokumentasian data/bukti dengan baik terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran, program, kegiatan maupun rencana aksi yang dilaksanakan.
3.	Melaksanakan pemantauan atas capaian Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja yang hasilnya memberikan penilaian dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.	Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap akhir bulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kegiatan atas rencana aksi dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan langkah antisipasinya
4.	Melaksanakan evaluasi atas Rencana Aksi yang hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Melaksanakan evaluasi atas Rencana Aksi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah nyata yaitu dengan mengajukan revisi plotting anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk kegiatan pengadaan tanah yang mengalami kegagalan sehingga dapat ditata kembali rencana pengadaan tanah untuk anggaran perubahan tahun 2019.

Kepala

Ir. Hari Setyowacono, MT.
NIP. 196401261993031005



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 555241; EMAIL : pertanahantataruang@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; Hotline E-mail : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Asal : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perihal : Atas Partisipasi, Dukungan dan Kontribusi Dalam Rangka Pelaksanaan
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh
Kota Yogyakarta.

Tanggal : 24 September 2019.

Kepala

Ir. Hari Setyowacono, MT.
NIP. 196401261993031005